

PENDAHULUAN

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila ia diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB). Pengaturan PBB, terdapat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau yang disebut dengan UUPBB. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi operasionalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Kemudian menurut Pasal 18 UU PBB, menyebutkan:

- a. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan (Pemerintah tingkat II sekarang adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah tingkat I sekarang adalah pemerintah provinsi).
- b. Bagian penerimaan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar diberikan kepada pemerintah tingkat II (Pemerintah Kabupaten).
- c. Imbalan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Umumnya masyarakat yang tidak membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan daerah, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak. Disamping itu, ada juga orang yang memiliki perekonomian, pendidikan yang baik serta yang tahu seluk beluk pajak dan manfaat pajak bagi negara maupun dirinya sendiri, tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat pada waktunya membayar PBB. Maka diperlukan sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak agar menerapkan dan sadar akan kewajibannya. Adapun data jumlah OP PBB pada tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah OP PBB Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah OP	WP yang Belum Bayar
-----------	-----------	---------------------

Bantaeng	14028	2179
Bissappu	15648	2586
Eremerasa	14254	1601
Gantarang Keke	12818	1716
Pajukukang	13786	2607
Sinoa	10819	139
Tompobulu	27459	4599
Uluere	9217	1900
Jumlah	118029	17327

Sumber: Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset

Berdasarkan data di atas, mengenai jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak di tahun 2014 itu menghampiri 15 persen dari total jumlah wajib pajak. Wajib pajak yang belum membayar pajak tentunya akan dikenakan sanksi oleh kantor pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun sanksi bagi wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda administratif serta surat teguran. Dalam menjatuhkan sanksi administratif, dilakukan oleh aparatur negara yang terdiri dari fungsionaris/ pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan kewajiban, berdasarkan perautan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.

Untuk memudahkan wajib pajak menerapkan kewajibannya, maka pemerintah menyediakan berbagai fasilitas diantaranya adalah: Bank, Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi dilapangan dalam

penerapan pemungutan PBB tidak semudah yang dibayangkan karena masih ada wajib pajak yang belum menyadari akan pentingnya pemenuhan kewajiban tersebut bagi dirinya dan negara, sehingga mereka belum mau membayar PBB. Dalam hal penerapan pemungutan PBB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bantaeng, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan atau kelalaian wajib pajak di Kabupaten Bantaeng. Hal ini tergambar data tentang terget dan pencapaian pendapatan pajak PBB Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2014, sebagai berikut: PBB yang ditargetkan APBD, Rp. 2.320.139.509, tetapi realisasinya hanya mencapai 94,76% yaitu Rp. 2.198.564.231.

Masalah penerapan sanksi administratif pernah diteliti pada tahun 2010 oleh Andi Farid Parenrengi dengan judul penelitian “Penerapan Pemberlakuan Sanksi Administrasi Pajak untuk Mewujudkan Pelaksanaan *Self Assessment System* pada PT. Pengembang Bisnis Sulawesi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi berupa denda terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak cukup efektif dalam penerapannya, karena jenis sanksi ini yang paling sering dijalankan kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu menyampaikan SPT. Sanksi administrasi berupa bunga terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak cukup efektif dalam penerapannya, karena penerapan sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan utang pajak menjadi bertumpuk. Sanksi administrasi berupa kenaikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak kurang efektif dalam penerapannya, karena merupakan sanksi yang Kurang Signifikan dalam penerapannya. Sanksi berupa kenaikan ini dihitung berdasarkan jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Selain itu, pada tahun 2014 oleh Restu Mutmainnah Marjan juga melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak secara parsial dan simultan. Variabel pelayanan fiskus memberikan pengaruh paling besar terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan formal wajib pajak sebesar 54,8%.

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, Nampak juga terjadi pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah di Kabupaten Bantaeng, dimana hasil pengamatan peneliti terlihat bahwasanya terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB mereka. Adapun contoh ketidakpatuhan mereka, yaitu: karena adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak tepat waktu. Hal itu merupakan bentuk ketidakpatuhan dari wajib pajak terhadap pelaksanaan aturan Pajak. Oleh Karena itu, wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran atas kewajiban mereka di dalam membayar pajak perlu dikenakan sanksi yang tegas dari kantor setempat. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di kantor pajak Kabupaten Bantaeng yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menemukan atau menghasilkan tata cara penerapan sanksi administratif kepada wajib pajak PBB yang tidak patuh menunaikan kewajiban khususnya di Kabupaten Bantaeng.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Kantor Pajak Kabupaten Bantaeng sebagai acuan atau referensi dalam rangka menghasilkan keputusan pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak PBB yang tidak patuh menunaikan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantaeng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bantaeng dapat dikategorikan pelaksanaannya masih kurang baik. Melihat dari indikator dalam penelitian ini, yaitu 1) ketidakpatuhan membayar pajak dapat dikategorikan masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajaknya terutama pajak PBB, 2) pengusaha yang bebas pajak dapat dikategorikan belum berjalan dengan baik, dan 3) Pemberian sanksi dapat dikategorikan belum berjalan dengan baik.

Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak bumi dan bangunannya di Kabupaten Bantaeng tidak berjalan dengan baik itu dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak perpajakan untuk mengidentifikasi kepada siapa saja wajib pajak yang melanggar dalam perpajakannya. Selain itu, kurangnya ketegasan dari pihak perpajakan untuk memberikan sanksi yang tegas dan secara adil kepada wajib pajak yang selalu melanggar dalam membayar serta melaporkan pajaknya. Dalam pemberian sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak mereka, dan yang kedua bagi wajib pajak yang tetap melanggar akan dikenakan lagi 2% dari denda yang dibayarkan setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perludikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk dapat bekerjasama dengan pihak instansi yang terkait dengan perpajakan untuk mengatasi masalah wajib pajak yang selalu melanggar dengan memberikan kepada mereka sanksi yang secara tegas, adil dan konsisten.
2. Diharapkan kepada seluruh pihak instansi di Kabupaten Bantaeng yang terkait mengatasi masalah perpajakan kiranya dapat meningkatkan pelayanannya di dalam menyediakan wadah atau fasilitas kepada masyarakat yang dapat memudahkan bagi mereka untuk membayar pajaknya.
3. Diharapkan pula kepada masyarakat untuk sadar akan pentingnya melaksanakan salah satu kewajibannya sebagai masyarakat yaitu dengan selalu membayar dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.